

BLOCKCHAIN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MENGATASI KORUPSI DAN PENIPUAN DALAM PROSES EXPOR-IMPOR DI INDONESIA

Dwi Fitriana dan Albert Fajar Yuga Yusdi Putra

Program Magister Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Jl. Jenderal Sudirman RT 02 RW 04 No. 51, Karet Semanggi, Jakarta 12930

Corresponding Author: ayusdipu@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dalam sektor ekspor-impor, sering menghadapi tantangan serius terkait korupsi dan penipuan yang menghambat efisiensi dan transparansi. Meskipun terdapat banyak regulasi yang mengatur perdagangan internasional, celah dalam sistem pengawasan dan birokrasi yang kompleks sering kali dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Korupsi dalam proses ekspor-impor, seperti yang terjadi dalam kasus ekspor nikel dengan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun, menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekonomi dan reputasi negara. Dalam konteks ini, teknologi *blockchain* hadir sebagai solusi potensial yang dapat meningkatkan transparansi dan keamanan proses ekspor-impor. *Blockchain* menawarkan sistem pencatatan data yang terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat diubah, sehingga memungkinkan setiap transaksi dalam proses ekspor-impor dapat diaudit dengan mudah. Teknologi ini juga memungkinkan penerapan *smart-contracts* yang secara otomatis mengeksekusi perjanjian ketika syarat tertentu terpenuhi, mengurangi peluang manipulasi data dan penyuapan. Dengan mengadopsi teknologi *blockchain*, Indonesia dapat memperkuat pengawasan terhadap kegiatan ekspor-impor dan mencegah praktik korupsi serta penipuan yang merugikan negara. Implementasi *blockchain* dalam rantai pasok global telah terbukti sukses di beberapa negara, seperti China, yang menggunakan VeChain untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dalam proses perdagangan.

Kata Kunci: *Blockchain*, **Korupsi**, **Ekspor-Import**, **Smart Contract**, **Desentralisasi**

ABSTRACT

Indonesia, as a country with significant potential in the export-import sector, frequently encounters serious challenges related to corruption and fraud, which hinder efficiency and transparency. Despite the existence of numerous regulations governing international trade, loopholes in the monitoring system and complex bureaucratic processes are often exploited by individuals to engage in corrupt practices. Corruption in the export-import process, such as the nickel export case resulting in state losses amounting to IDR 300 trillion, has had a profoundly negative impact on the nation's economy and reputation. In this context, blockchain technology emerges as a potential solution to enhance the transparency and security of export-import processes. Blockchain offers a decentralized, transparent, and immutable system for recording data, enabling every transaction within the export-import process to be easily audited. This technology also facilitates the implementation of smart contracts, which automatically execute agreements when specific conditions are met, thereby reducing the opportunities for data manipulation and bribery. By adopting blockchain technology, Indonesia can strengthen oversight of export-import activities and prevent corrupt practices and fraud that harm the state. The implementation of blockchain in global supply chains has proven successful in several countries, such as China, which employs VeChain to enhance efficiency and trust in trade processes.

Keywords: Blockchain, Corruption, Export-Import, Smart Contract, Decentralization

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam bidang ekspor dan impor. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan global. Namun, potensi ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah korupsi dan penipuan yang menghambat efisiensi dan transparansi dalam proses ekspor-impor.

Proses ekspor dan impor di Indonesia diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kementerian Perdagangan bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan perdagangan, sementara Bea Cukai bertugas mengawasi dan mengendalikan lalu lintas barang yang keluar dan masuk negara. Prosedur ekspor-impor mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengajuan izin dan dokumen hingga pemeriksaan fisik barang di pelabuhan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar USD 200 miliar, dengan komoditas utama seperti minyak kelapa sawit, batu bara, tekstil, dan elektronik. Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada tahun yang sama mencapai sekitar USD 180 miliar, dengan barang-barang seperti mesin, peralatan listrik, dan bahan baku industri menjadi komponen utama¹. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki volume perdagangan yang sangat besar, yang jika tidak diawasi dengan ketat, rawan terhadap praktik korupsi dan penipuan.

Proses ekspor-impor di Indonesia melibatkan banyak pihak dan tahapan, mulai dari pengajuan izin di Kementerian Perdagangan, pemeriksaan dokumen di Bea Cukai, hingga pengiriman barang melalui pelabuhan. Setiap tahapan ini berpotensi menjadi titik rawan korupsi jika tidak diawasi dengan baik. Misalnya, dalam pengajuan izin ekspor, perusahaan dapat menyuap pejabat untuk mempercepat proses atau memanipulasi data untuk menghindari pajak dan bea cukai yang tinggi. Begitu pula dalam pemeriksaan fisik barang, suap dapat terjadi untuk meloloskan barang tanpa pemeriksaan ketat.

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Ekspor dan Impor Indonesia 2023."

Berdasarkan laporan *Transparency International*, indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2023 berada pada skor 38 dari 100, menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di berbagai sektor, termasuk sektor ekspor-impor². Kasus-kasus korupsi ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional, yang dapat berdampak negatif pada kepercayaan investor dan mitra dagang.

Nilai ekspor dan impor Indonesia yang mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya merupakan angka yang fantastis. Angka ini menunjukkan potensi ekonomi yang besar, namun juga menandakan risiko tinggi jika tidak didukung oleh sistem pemantauan yang ketat. Dengan volume perdagangan yang besar, celah-celah dalam sistem regulasi dan pengawasan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi. Tanpa pengawasan yang memadai, negara bisa kehilangan pendapatan yang signifikan dari pajak dan bea cukai, yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan nasional.

Neraca perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Jika nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor, maka neraca perdagangan menjadi minus atau defisit. Neraca perdagangan yang terus-menerus defisit dapat membawa dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Pertama, defisit perdagangan dapat menyebabkan penurunan cadangan devisa negara, yang digunakan untuk membayar impor dan melunasi utang luar negeri. Kedua, defisit perdagangan dapat melemahkan nilai tukar mata uang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan biaya impor dan menambah beban inflasi .

Di Indonesia, neraca perdagangan sering kali mengalami fluktuasi, tergantung pada berbagai faktor seperti harga komoditas internasional dan permintaan pasar global. Meskipun pada beberapa tahun Indonesia berhasil mencatat surplus perdagangan, namun tantangan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan tetap ada. Jika tidak dikelola dengan baik, defisit perdagangan yang berkepanjangan dapat mengancam stabilitas ekonomi nasional.

Dengan potensi besar dalam sektor ekspor-impor, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan. Namun, masalah korupsi

² Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023."

dan penipuan dalam proses ekspor-impor menjadi tantangan serius yang harus diatasi. Nilai perdagangan yang fantastis harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik korupsi. Selain itu, menjaga keseimbangan neraca perdagangan sangat penting untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dalam konteks ini, teknologi *blockchain* dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses ekspor-impor, yang pada akhirnya dapat membantu Indonesia mengatasi masalah korupsi dan penipuan di sektor ini.

Korupsi dan Kesulitan di Bidang Ekspor dan Impor di Indonesia

Korupsi dalam bidang ekspor dan impor telah menjadi masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Praktik korupsi ini tidak hanya terjadi dalam skala kecil, tetapi juga melibatkan nilai transaksi yang sangat besar. Salah satu kasus korupsi terbesar yang mencuat baru-baru ini adalah terkait ekspor nikel, dengan nilai mencapai Rp 300 triliun. Selain itu, terdapat kasus-kasus korupsi lainnya yang juga melibatkan nilai transaksi yang signifikan, menambah kompleksitas dan tantangan dalam memberantas korupsi di sektor ini.

Baru-baru ini, Indonesia diguncang oleh kasus korupsi ekspor nikel yang melibatkan pejabat tinggi dan perusahaan besar. Nilai korupsi dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 300 triliun, menjadikannya salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia³. Kasus ini terungkap ketika adanya penyelidikan mendalam oleh Kejagung yang menemukan adanya manipulasi data dan suap dalam proses perizinan ekspor nikel di Kawasan Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk. Perusahaan-perusahaan yang terlibat diduga memberikan suap kepada pejabat untuk mendapatkan izin ekspor tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari segi pendapatan, tetapi juga merusak ekosistem tambang dan lingkungan.

Selain ekspor, impor juga menjadi lahan subur bagi praktik korupsi. Salah satu kasus korupsi impor yang mencuat adalah kasus impor beras yang melibatkan pejabat di Kementerian Perdagangan dan beberapa importir.⁴ Dalam kasus ini, pejabat diduga menerima suap untuk memanipulasi kuota impor dan mengeluarkan izin impor beras yang seharusnya tidak

³ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Laporan Kasus Korupsi Ekspor Nikel."

⁴ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Laporan Kasus Korupsi Impor Beras."

diberikan. Akibatnya, beras impor yang tidak memenuhi standar kualitas masuk ke pasar domestik, merugikan petani lokal dan konsumen. Nilai transaksi dalam kasus ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah, menunjukkan betapa besar dampak korupsi dalam sektor impor terhadap perekonomian Indonesia.

Kesulitan dalam Mengatasi Korupsi di Bidang Ekspor-Import

Mengatasi korupsi di bidang ekspor-impor bukanlah tugas yang mudah. Beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia sering kebobolan korupsi dalam sektor ini antara lain:

1. Birokrasi yang Kompleks dan Rentan

- Proses ekspor-impor di Indonesia melibatkan banyak tahapan dan instansi, mulai dari Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hingga Badan Karantina. Setiap tahapan ini berpotensi menjadi titik rawan korupsi jika tidak diawasi dengan ketat. Birokrasi yang kompleks sering kali memaksa pelaku usaha untuk "mempercepat" proses dengan cara memberikan suap kepada pejabat yang berwenang.

2. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

- Meskipun Indonesia memiliki lembaga-lembaga pengawas seperti KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sering kali pengawasan terhadap proses ekspor-impor masih lemah. Selain itu, penegakan hukum yang kurang tegas membuat para pelaku korupsi merasa aman untuk melakukan praktik ilegal. Banyak kasus korupsi yang terungkap namun tidak diikuti dengan tindakan hukum yang tegas, sehingga tidak memberikan efek jera.

3. Keterlibatan Pejabat Tinggi dan Pengaruh Politik

- Banyak kasus korupsi ekspor-impor melibatkan pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan besar dan pengaruh politik. Keterlibatan pejabat tinggi ini membuat proses hukum menjadi rumit dan sering kali berujung pada impunitas. Selain itu, pengaruh politik juga sering kali digunakan untuk melindungi pelaku korupsi dari jeratan hukum.

4. Sistem Teknologi Informasi yang Tidak Terintegrasi

- Sistem pencatatan dan pelaporan dalam proses ekspor-impor di Indonesia masih terfragmentasi dan tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini membuat

manipulasi data menjadi lebih mudah dilakukan. Kurangnya integrasi sistem juga mengakibatkan kesulitan dalam melakukan cross-check dan verifikasi data antara berbagai instansi yang terlibat.

5. *Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas*

- Transparansi dalam proses perizinan dan pemeriksaan barang masih rendah. Banyak informasi yang seharusnya bisa diakses publik tidak tersedia atau sengaja disembunyikan. Kurangnya akuntabilitas pejabat yang berwenang juga membuat praktik korupsi sulit diungkap dan dihentikan.

Korupsi dalam sektor ekspor-impor memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian dan reputasi Indonesia. Dari segi ekonomi, korupsi menyebabkan kerugian besar bagi negara, baik dalam bentuk kehilangan pendapatan pajak dan bea cukai maupun dalam bentuk kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. Dari segi reputasi, korupsi menurunkan kepercayaan investor dan mitra dagang internasional, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Penerapan teknologi modern seperti *blockchain* dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses ekspor-impor, sehingga dapat mengurangi peluang korupsi dan penipuan. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar dalam sektor ekspor-impor untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Blockchain merupakan inovasi teknologi yang menawarkan solusi revolusioner untuk berbagai masalah, termasuk masalah dalam proses ekspor dan impor. Teknologi ini dapat meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dalam rantai pasok global. Dengan prinsip desentralisasi dan kemampuannya untuk mencatat transaksi secara permanen dan tidak dapat diubah, *blockchain* memiliki potensi besar untuk mengatasi praktik korupsi dan penipuan yang sering terjadi dalam proses ekspor dan impor.

Prinsip Teknologi *Blockchain*

Blockchain adalah sebuah buku besar digital yang didistribusikan dan tidak dapat diubah, di mana transaksi dicatat dalam blok-blok yang saling terkait. Prinsip utama dari

teknologi *blockchain* adalah desentralisasi, transparansi, dan keamanan. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam blok, dan setiap blok baru ditambahkan ke rantai blok sebelumnya, membentuk sebuah rantai yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari seluruh jaringan. Hal ini membuat *blockchain* sangat aman dan transparan, karena setiap perubahan atau manipulasi data akan terlihat oleh semua peserta jaringan.

Sejarah *Blockchain*

Blockchain pertama kali diperkenalkan oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 melalui whitepaper berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Pada tahun 2009, Nakamoto meluncurkan Bitcoin sebagai implementasi pertama dari teknologi *blockchain*. Bitcoin adalah mata uang digital yang menggunakan *blockchain* untuk mencatat semua transaksi secara terbuka dan desentralisasi⁵.

Sejak saat itu, teknologi *blockchain* telah berkembang pesat. Pada tahun 2015, Vitalik Buterin memperkenalkan Ethereum, sebuah platform yang tidak hanya mendukung mata uang digital tetapi juga memungkinkan penerapan "*smart contracts*" atau kontrak cerdas. Smart contract adalah program komputer yang berjalan di atas *blockchain* dan secara otomatis mengeksekusi perjanjian berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya. Ini memungkinkan aplikasi yang lebih kompleks di berbagai sektor, termasuk ekspor dan impor.

Potensi *Blockchain* dalam Proses Ekspor-Import

Blockchain memiliki beberapa keunggulan yang dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah dalam proses ekspor-impor:

1. *Transparansi dan Akuntabilitas*

- Setiap transaksi dicatat secara permanen dan terbuka di dalam *blockchain*, sehingga memudahkan audit dan verifikasi. Ini dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penipuan karena semua data dapat diakses dan diverifikasi oleh semua pihak yang berkepentingan.

2. *Keamanan*

⁵ Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008.

- Dengan sifat desentralisasi dan enkripsi yang kuat, *blockchain* sangat sulit untuk diretas atau dimanipulasi. Ini memastikan bahwa data transaksi tetap aman dan tidak dapat diubah.

3. Efisiensi

- Proses yang biasanya memakan waktu lama seperti verifikasi dokumen dan pembayaran dapat dipercepat dengan penggunaan smart contract yang otomatis. Ini mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan transaksi.

Tantangan Implementasi Blockchain

Meskipun *blockchain* memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses ekspor-impor, implementasinya tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya regulasi yang mendukung penggunaan teknologi ini. Regulasi yang ada sering kali belum mengakomodasi karakteristik unik dari *blockchain*, seperti desentralisasi dan anonimitas. Selain itu, kurangnya pemahaman dan keahlian teknis di kalangan pemangku kepentingan juga menjadi hambatan dalam adopsi teknologi ini.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan mendukung inovasi. Pemerintah dan lembaga internasional perlu bekerja sama untuk mengembangkan regulasi yang memungkinkan penggunaan *blockchain* tanpa mengorbankan keamanan dan kepatuhan hukum. Selain itu, pendidikan dan pelatihan tentang teknologi *blockchain* perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami cara kerja dan manfaat teknologi ini.

Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional juga perlu mengikuti perkembangan teknologi untuk mendukung implementasi *blockchain*. Saat ini, beberapa negara telah mulai mengadopsi regulasi yang mendukung penggunaan *blockchain* dalam perdagangan internasional. Misalnya, China telah mengimplementasikan *blockchain* dalam rantai pasok untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pemerintah China telah mengeluarkan regulasi yang mendukung penggunaan *blockchain* dalam berbagai sektor, termasuk ekspor-impor, untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik dan dapat diaudit.

Di sisi lain, beberapa negara masih tertinggal dalam mengembangkan regulasi yang mendukung penggunaan *blockchain*. Ini mengakibatkan adanya kesenjangan dalam penerapan teknologi ini di berbagai negara. Untuk mencapai potensi penuh dari *blockchain*, diperlukan upaya bersama dari semua negara untuk mengembangkan regulasi yang seragam dan mendukung inovasi.

Sejarah *blockchain* menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat memberikan solusi untuk berbagai masalah yang kompleks, termasuk dalam proses ekspor-impor. Dengan prinsip desentralisasi, transparansi, dan keamanan, *blockchain* memiliki potensi besar untuk mengatasi praktik korupsi dan penipuan. Namun, implementasi teknologi ini menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam hal regulasi dan pemahaman teknis. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang mendukung dan upaya pendidikan yang intensif untuk memastikan bahwa *blockchain* dapat diterapkan secara efektif dalam proses ekspor-impor.

Indonesia telah mengalami berbagai kasus korupsi signifikan dalam bidang ekspor-impor, yang menyoroti kelemahan dalam sistem regulasi dan pengawasan. Berikut adalah empat contoh kasus korupsi besar dalam ekspor dan impor yang memberikan gambaran tentang skala dan kompleksitas masalah ini.

1. Kasus Ekspor Nikel oleh Harvey Moeis dan Helena Lim

Salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia adalah kasus ekspor nikel ilegal yang melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim. Pada tahun 2023, Kejaksaan Agung mengungkap skandal ini, di mana perusahaan-perusahaan yang terlibat memberikan suap kepada pejabat untuk mendapatkan izin ekspor tanpa memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kasus ini merugikan negara hingga Rp 271 triliun dan melibatkan kerusakan ekosistem tambang yang signifikan.⁶

2. Kasus Ekspor Benih Lobster oleh Edhy Prabowo

Kasus korupsi ekspor benih lobster melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Pada tahun 2020, Edhy Prabowo ditangkap oleh KPK karena menerima suap sebesar Rp 24,6 miliar dan USD 77 ribu dari pengusaha untuk memuluskan perizinan ekspor benih lobster. Skandal ini tidak hanya merugikan negara secara finansial tetapi juga

⁶ Katadata.co.id, "Fakta Korupsi PT Timah, Seret Harvey Moeis dan Rugikan Negara Rp271 T," 2023.

mengancam keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Edhy Prabowo divonis lima tahun penjara dan didenda Rp 400 juta.⁷

3. Kasus Impor Beras

Korupsi dalam impor beras juga menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu kasus besar adalah skandal impor beras pada tahun 2023, di mana sejumlah pejabat dari Badan Urusan Logistik (Bulog) terlibat dalam korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Mereka diduga melakukan mark-up harga beras impor dan menerima suap dari para importir untuk mendapatkan izin impor lebih mudah. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan dan merusak kredibilitas Bulog sebagai lembaga yang seharusnya menjaga stabilitas pangan nasional.⁸

4. Kasus Impor Gula

Kasus korupsi impor gula pada tahun 2023 melibatkan pejabat dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan Kementerian Perdagangan. Pejabat tersebut menerima suap untuk mengeluarkan izin impor gula secara ilegal dan memalsukan dokumen impor. Akibatnya, gula yang diimpor tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan, menyebabkan kerugian besar bagi negara dan konsumen lokal.⁹

Keempat kasus di atas menyoroti berbagai celah dalam sistem regulasi dan pengawasan ekspor-impor di Indonesia. Kompleksitas regulasi, kurangnya transparansi, dan pengawasan yang lemah menciptakan lingkungan yang subur untuk korupsi dan penipuan. Pejabat yang korup memanfaatkan celah ini untuk keuntungan pribadi, sementara pelaku usaha yang tidak jujur dapat menghindari aturan dan regulasi yang ada. Akibatnya, negara mengalami kerugian ekonomi yang signifikan, dan pelaku usaha yang jujur harus bersaing dengan mereka yang menggunakan cara-cara ilegal. Reformasi komprehensif dalam sistem regulasi dan pengawasan, termasuk penggunaan teknologi modern seperti *blockchain*, diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data serta memperkuat penegakan hukum dalam sektor ini.

⁷ Katadata.co.id, "Kasus Benih Lobster, Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Bui," 2021.

⁸ Tirto.id, "Membongkar Penyebab Indonesia Doyan Impor Beras," 2023.

⁹ Katadata.co.id, "Kejagung Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP," 2024.

B. Pembahasan

Penulis memilih untuk mengambil studi kasus korupsi nikel oleh Harvey Moeis dan Helena Lim karena ini adalah kasus terbaru dan memiliki nilai fantastis yang belum pernah terjadi dalam sejarah korupsi di Indonesia. Kasus ini mengungkapkan berbagai kelemahan dalam sistem regulasi dan pengawasan di sektor ekspor-impor, serta menunjukkan betapa dalam dan kompleksnya jaringan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan pengusaha berpengaruh.

1. Kasus Korupsi Nikel oleh Harvey Moeis dan Helena Lim

a. Sejarah Kasus

Kasus korupsi nikel yang melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim terungkap pada tahun 2023. Harvey Moeis, seorang pengusaha terkenal dan suami dari selebriti Sandra Dewi, bersama Helena Lim, yang dikenal sebagai "Crazy Rich Pantai Indah Kapuk," ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kasus ini terkait dengan dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas nikel yang menyebabkan kerugian negara yang awalnya diperkirakan sebesar Rp 271 triliun dan kemudian dinaikkan menjadi Rp 300 triliun.

Harvey Moeis dikenal luas di kalangan bisnis sebagai pengusaha batu bara yang sukses. Namanya semakin dikenal publik setelah menikah dengan Sandra Dewi, seorang aktris populer di Indonesia. Keterlibatan Harvey dalam kasus korupsi ini mengejutkan banyak pihak karena posisinya yang cukup tinggi dalam masyarakat dan dunia bisnis. Menurut laporan, Harvey berperan dalam melobi beberapa perusahaan untuk menyetujui penambangan nikel tanpa izin atau secara ilegal. Tindakannya ini melibatkan sejumlah besar uang dan manipulasi data untuk mengamankan keuntungan pribadi yang besar.

Helena Lim, di sisi lain, adalah seorang pengusaha yang sering muncul di media sosial dan dikenal sebagai salah satu orang kaya baru di Jakarta. Helena terlibat dalam kasus ini dengan memberikan fasilitas dan bantuan untuk mengelola hasil tambang ilegal melalui perusahaannya, PT QSE. Perannya termasuk menyewakan peralatan dan sarana untuk proses peleburan nikel yang diduga digunakan untuk menutupi aktivitas ilegal ini. Keterlibatan

Helena dalam skandal korupsi ini mengejutkan publik karena profilnya sebagai "Crazy Rich PIK" dan kehadirannya yang mencolok di dunia sosialita Jakarta.¹⁰

Proses investigasi dan pengungkapan kasus ini dilakukan secara mendalam oleh Kejaksaan Agung. Penangkapan Harvey Moeis dan Helena Lim menjadi berita besar dan menarik perhatian luas. Keduanya ditahan dan dihadapkan pada berbagai tuduhan termasuk suap, manipulasi data, dan pelanggaran hukum lingkungan. Skandal ini tidak hanya menunjukkan bagaimana sistem ekspor-impor dapat disalahgunakan tetapi juga bagaimana individu-individu dengan pengaruh besar dapat terlibat dalam aktivitas ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.

Proses hukum yang panjang dan birokratis menambah kompleksitas kasus ini. Kejaksaan Agung, bersama dengan berbagai lembaga terkait, terus mengumpulkan bukti dan melanjutkan penyelidikan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dihukum. Penangkapan ini juga diikuti dengan penggeledahan rumah dan properti milik para tersangka untuk mengamankan bukti tambahan dan mengidentifikasi aliran dana yang terkait dengan korupsi ini.

Kasus ini menggambarkan bagaimana kekuatan dan pengaruh dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan negara. Harvey Moeis dan Helena Lim, melalui koneksi dan sumber daya mereka, berhasil menjalankan operasi yang rumit dan luas yang melibatkan banyak pihak. Skandal ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, mengingat besarnya area tambang yang dikelola secara ilegal dan kerusakan ekosistem yang diakibatkan.

Dengan demikian, kasus korupsi nikel oleh Harvey Moeis dan Helena Lim menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan dalam sistem hukum dan regulasi dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki akses dan kekuasaan. Skandal ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor ekspor-impor Indonesia.

¹⁰ Katadata.co.id, "Fakta Korupsi PT Timah, Seret Harvey Moeis dan Rugikan Negara Rp271 T," 2023.

b. Pengembangan Kasus

Kasus korupsi ekspor nikel yang melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim tidak hanya melibatkan dugaan suap dan manipulasi data, tetapi juga melibatkan keterlibatan berbagai pihak termasuk pejabat tinggi. Pada awal 2023, Kejaksaan Agung mengumumkan penangkapan Harvey Moeis dan Helena Lim serta beberapa pejabat tinggi lainnya. Keterlibatan jenderal dan pejabat tinggi menambah lapisan kompleksitas dalam kasus ini, yang semakin menarik perhatian publik dan media.

Keterlibatan Jenderal dalam skandal ini memicu penguntitan oleh Densus terhadap Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), yang mengejutkan banyak pihak. Tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya kasus ini dan bagaimana upaya untuk mengungkap semua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar. Penangkapan dan investigasi ini menjadi berita besar, mengguncang kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Kejaksaan Agung mengkonfirmasi bahwa Jampidsus Febrie Adriansyah dibuntuti oleh anggota Densus 88 ketika sedang makan malam di sebuah restoran di Cipete, Jakarta Selatan, yang mengindikasikan adanya ancaman serius terhadap pejabat yang menangani kasus ini.¹¹

Presiden Indonesia turun tangan untuk memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius dan semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Penegasan ini menekankan pentingnya menangani korupsi dengan tegas untuk menjaga integritas pemerintahan dan kepercayaan publik. Nilai korupsi yang awalnya diperkirakan sebesar Rp 271 triliun kemudian dinaikkan menjadi Rp 300 triliun setelah dilakukan audit lebih mendalam oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peningkatan nilai kerugian ini semakin menegaskan betapa besar skala korupsi yang terjadi dan dampak finansial yang ditimbulkan bagi negara.

Selain kerugian finansial, kasus ini juga berdampak besar pada lingkungan. Aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin resmi merusak ekosistem tambang dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Pengungkapan kasus ini membuka

¹¹ Ni'am, Syakirun, dan Dani Prabowo. "Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK." *Kompas.com*, 28 Mei 2024

mata banyak pihak tentang pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam industri pertambangan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah di masa depan.

Pengembangan kasus ini melibatkan berbagai upaya hukum yang kompleks, termasuk penangkapan lebih banyak tersangka dan penggeledahan rumah serta aset para pelaku. Proses hukum yang berlangsung menunjukkan betapa luasnya jaringan korupsi yang terlibat dan upaya yang diperlukan untuk mengungkap semua pihak yang bertanggung jawab. Kasus ini menggambarkan bagaimana jaringan korupsi dapat melibatkan berbagai lapisan masyarakat, dari pengusaha hingga pejabat tinggi. Skandal ini tidak hanya berdampak pada ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menguji ketegasan dan integritas sistem hukum Indonesia dalam menindak korupsi di tingkat tertinggi. Dengan perhatian publik yang sangat besar, harapan untuk reformasi yang lebih baik dan penegakan hukum yang lebih tegas semakin tinggi.

c. Rumitnya Pengembalian Kerugian Negara

Pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi nikel yang melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kasus ini. Besarnya kerugian yang mencapai Rp 300 triliun menuntut upaya yang sangat serius dan terstruktur dari berbagai lembaga pemerintah untuk dapat mengembalikan dana yang hilang. Salah satu kendala utama adalah keterlibatan pejabat tinggi yang memiliki pengaruh kuat dan jaringan luas, yang membuat proses hukum menjadi lebih kompleks dan penuh tantangan.

Dalam kasus ini, peran pejabat tinggi sangat signifikan. Harvey Moeis dan Helena Lim tidak bertindak sendirian; mereka diduga bekerja sama dengan beberapa pejabat penting di berbagai instansi pemerintahan. Pejabat-pejabat ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi sistem dan melindungi operasi ilegal mereka dari pengawasan. Hal ini menyulitkan proses penegakan hukum dan memperpanjang proses pengembalian kerugian negara. Selain itu, jaringan korupsi yang luas juga mencakup individu-individu berpengaruh lainnya yang turut serta dalam skema korupsi ini, baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pendukung.

Salah satu tantangan terbesar dalam mengembalikan kerugian negara adalah melacak dan menyita aset yang dimiliki oleh para pelaku. Aset-aset ini sering kali disembunyikan dengan cermat atau diinvestasikan dalam bentuk yang sulit dilacak, seperti properti di luar

negeri, investasi di perusahaan fiktif, atau rekening bank yang tidak terdaftar atas nama mereka. Proses penyitaan ini memerlukan kerja sama internasional dan bantuan dari otoritas hukum di berbagai negara, yang bisa menjadi sangat rumit dan memakan waktu.

Selain itu, proses hukum yang panjang dan birokratis juga menjadi kendala. Meskipun sudah ada bukti kuat dan penangkapan telah dilakukan, membawa kasus ini hingga ke pengadilan dan memastikan hukuman bagi semua pelaku memerlukan waktu yang lama. Selama proses ini, ada kemungkinan bahwa pelaku dapat menghilangkan atau memindahkan aset-aset mereka, sehingga mengurangi jumlah dana yang dapat dikembalikan kepada negara. Upaya pengembalian kerugian negara juga menghadapi tantangan dalam bentuk tekanan politik dan sosial. Pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus ini sering kali memiliki dukungan politik yang kuat, yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Tekanan dari berbagai pihak untuk melindungi individu-individu tertentu atau untuk memperlambat proses hukum juga dapat menghambat upaya pengembalian kerugian negara.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi yang terkoordinasi dan komprehensif. Ini termasuk memperkuat kerja sama internasional untuk melacak dan menyita aset, meningkatkan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan adil. Reformasi dalam sistem regulasi dan pengawasan juga sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Penerapan teknologi seperti *blockchain* dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses ekspor-impor, sehingga meminimalkan peluang terjadinya korupsi.

Secara keseluruhan, pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi nikel ini adalah proses yang sangat rumit dan menantang, namun sangat penting untuk dilakukan. Dengan upaya yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan dana yang hilang dapat dikembalikan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan dapat dipulihkan.

2. Penerapan *Blockchain* dalam Menyelesaikan Masalah Ini

Korupsi dalam sektor ekspor-impor, seperti yang terlihat dalam kasus Harvey Moeis dan Helena Lim, menunjukkan kebutuhan mendesak akan sistem yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah manipulasi data ekspor

oleh pejabat yang korup. Data ekspor sebuah negara biasanya tersedia di database *World Trade Organization* (WTO), namun sering kali data ini tidak dicerminkan dalam data nasional. Pejabat yang korup dapat menyembunyikan atau memalsukan data nasional untuk menutupi kegiatan ilegal mereka. Hal ini disampaikan oleh ekonom Faisal Basri, yang menyoroti bagaimana pejabat tinggi terlibat dalam penyelundupan nikel dengan menyembunyikan data ekspor yang sebenarnya.¹²

Analisis Bagaimana *Blockchain* Bisa Mengatasi Masalah Korupsi dalam Kasus Ini

Blockchain adalah teknologi yang mendistribusikan data dalam bentuk ledger yang tidak bisa diubah, transparan, dan dapat diaudit oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ekspor-impor, *blockchain* dapat digunakan untuk melacak pergerakan barang, memverifikasi keaslian dokumen, dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar. Dengan *blockchain*, semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok—mulai dari penambang, pengangkut, hingga pihak yang mengolah barang—dapat memasukkan data mereka ke dalam satu sistem yang terdesentralisasi dan transparan.

Dalam kasus korupsi nikel, *blockchain* bisa digunakan untuk mencatat setiap langkah proses penambangan dan ekspor. Setiap kali nikel dipindahkan atau diubah, informasi tersebut akan diperbarui di *blockchain*, yang dapat diaudit kapan saja oleh pihak berwenang. Hal ini akan mengurangi peluang untuk manipulasi data dan suap karena semua tindakan akan terekam secara permanen dan dapat diverifikasi oleh pihak ketiga. Selain itu, penggunaan *smart contracts* dalam *blockchain* dapat memastikan bahwa semua persyaratan dan peraturan telah dipenuhi sebelum barang dapat dipindahkan ke tahap berikutnya dalam rantai pasok.

Contoh Penerapan *Blockchain* di China

China adalah salah satu negara yang telah sukses menerapkan teknologi *blockchain* dalam manajemen rantai pasok. VeChain, sebuah platform *blockchain* yang fokus pada solusi rantai pasok, telah digunakan di berbagai sektor di China untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Misalnya, VeChain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Walmart China untuk melacak pergerakan produk makanan dari petani hingga konsumen. Dengan menggunakan teknologi VeChain, setiap langkah dalam proses distribusi makanan

¹² "Faisal Basri Sebut Bobby dan Airlangga Terlibat Penyelundupan Nikel." *In Harmonia*, 2023

dicatat di *blockchain*, yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat termasuk konsumen akhir.

Teknologi ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Misalnya, jika ada masalah dengan produk tertentu, informasi yang akurat tentang asal-usul dan jalur distribusi produk tersebut dapat dengan mudah ditemukan di *blockchain*, memungkinkan penarikan produk yang cepat dan efisien.

Studi Kasus Penerapan Teknologi *Blockchain* dalam Supply Chain Ekspor-Impor di China

VeChain telah bekerja sama dengan banyak perusahaan besar untuk mengimplementasikan solusi *blockchain* dalam rantai pasok mereka. Salah satu contoh yang menonjol adalah kerja sama VeChain dengan DNV GL, sebuah perusahaan sertifikasi global, untuk melacak produk makanan dan minuman di China. Dalam proyek ini, VeChain menggunakan teknologi *blockchain* untuk mencatat informasi seperti suhu penyimpanan, waktu pengiriman, dan kondisi lingkungan selama transportasi. Semua data ini disimpan di *blockchain* dan dapat diakses oleh konsumen akhir melalui pemindaian kode QR pada produk.¹³

Implementasi *blockchain* ini telah berhasil meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang mereka beli dan mengurangi kasus penipuan serta pemalsuan produk. Selain itu, dengan adanya data yang transparan dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah lebih cepat, meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan teknologi serupa dapat sangat bermanfaat dalam mengatasi masalah korupsi dan meningkatkan transparansi dalam sektor ekspor-impor. Dengan menggunakan *blockchain* untuk mencatat setiap langkah dalam rantai pasok, dari penambangan hingga pengiriman, semua data akan tersimpan dengan aman dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi peluang untuk manipulasi dan korupsi.

Penerapan teknologi *blockchain*, seperti yang ditawarkan oleh VeChain, dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dan integritas dalam proses ekspor-impor di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan masalah-masalah korupsi seperti yang terjadi

¹³ VeChain. "Web3 for Better: Sustainable Blockchain Solutions." VeChain, 2024. <https://www.vechain.org>

dalam kasus Harvey Moeis dan Helena Lim dapat diatasi, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintahan dapat dipulihkan.

C. PENUTUP

Kasus korupsi dalam ekspor-impor di Indonesia, termasuk manipulasi data ekspor nikel yang merugikan negara dalam jumlah besar, menunjukkan perlunya reformasi mendasar dalam regulasi serta pengawasan perdagangan internasional. Berbagai celah sistemik telah dimanfaatkan oleh oknum berpengaruh untuk menyuap pejabat, memalsukan dokumen, serta menyalahgunakan kewenangan. Kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak reputasi Indonesia di mata pelaku usaha global.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperbarui dan menyelaraskan regulasi perdagangan internasional dengan standar internasional. Regulasi yang konsisten dan jelas akan memudahkan kepatuhan, meminimalkan konflik aturan, serta mengurangi ruang gerak koruptor. Penyelarasan dengan pedoman *World Trade Organization* (WTO) dan praktik terbaik negara lain akan meningkatkan kredibilitas sistem perdagangan Indonesia. Selanjutnya, transparansi harus menjadi fondasi utama. Informasi tentang regulasi, persyaratan, dan proses perizinan harus mudah diakses publik. Digitalisasi perizinan, publikasi laporan audit, serta pengungkapan proses pengambilan keputusan akan memangkas birokrasi yang bertele-tele dan menghambat pelaku usaha. Upaya ini juga dapat mempersempit peluang suap dan manipulasi yang biasa terjadi di balik proses tertutup.

Peningkatan kapasitas lembaga pengawas, seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, juga sangat penting. Pelatihan berkala, perekrutan tenaga ahli, serta adopsi teknologi pengawasan canggih (misalnya sensor IoT atau AI) akan memperkuat deteksi dini pelanggaran. Penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberian sanksi berat kepada pelanggar, akan memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dari perspektif teknologi, *blockchain* menawarkan solusi menjanjikan. Teknologi ini memastikan setiap transaksi tercatat permanen, sulit dimanipulasi, dan mudah diaudit. Penerapan *blockchain* pada rantai pasok ekspor-impor dapat melacak pergerakan barang secara real-time, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengurangi ketergantungan

pada verifikasi manual. Contoh dari China menunjukkan bahwa integrasi *blockchain* mampu meningkatkan efisiensi, mengurangi penipuan, serta memperkuat kepercayaan konsumen terhadap produk yang diperdagangkan.

Kerja sama internasional juga perlu ditingkatkan. Pertukaran informasi, pelatihan bersama, serta kolaborasi di forum perdagangan dunia akan membantu Indonesia mengadopsi praktik terbaik dan memperbarui standar pengawasan. Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan posisi tawarnya dan turut menciptakan ekosistem perdagangan global yang lebih transparan, efisien, dan adil.

Singkatnya, reformasi regulasi, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, serta adopsi teknologi *blockchain* merupakan langkah-langkah strategis untuk memerangi korupsi dalam ekspor-impor. Upaya ini akan meningkatkan integritas sistem perdagangan, mengundang lebih banyak investasi asing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika diterapkan secara konsisten, langkah-langkah tersebut dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain yang kredibel dan kompetitif dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

- Hutabarat, Samuel M.P. *Sistem Hukum, Globalisasi, dan Keabsahan Kontrak*. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Tapscott, Don, dan Alex Tapscott. *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World*. Penguin, 2016.
- Mougayar, William. *The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology*. Wiley, 2016.
- Swan, Melanie. *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. O'Reilly Media, 2015.

2. Artikel / Jurnal:

- Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Ekspor dan Impor Indonesia 2023."
- Transparency International, "Corruption Perceptions Index 2023."
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), "Laporan Kasus Korupsi Ekspor Nikel."
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Laporan Kasus Korupsi Impor Beras."
- Satoshi Nakamoto, "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 2008.
- Sunny Lu, "Vechain: The *Blockchain* Solution for Supply Chain," *Vechain Whitepaper*, 2015.
- Walmart China and Vechain, "*Blockchain*-Enabled Food Safety and Traceability Platform."
- World Trade Organization (WTO), "The *World Trade Organization* in Brief."

3. Peraturan Perundang-Undangan / Perjanjian Internasional:

- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor*.

4. INTERNET :

- Katadata.co.id, "*Fakta Korupsi PT Timah, Seret Harvey Moeis dan Rugikan Negara Rp271 T*," 2023.

Katadata.co.id, "*Kasus Benih Lobster, Eks Menteri KKP Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Bui,*" 2021.

Tirto.id, "*Membongkar Penyebab Indonesia Doyan Impor Beras,*" 2023.

Katadata.co.id, "*Kejagung Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP,*" 2024.

Ni'am, Syakirun, dan Dani Prabowo. "*Usai Diduga Dibuntuti Densus 88, Jampidsus Kini Dilaporkan ke KPK.*" Kompas.com, 28 Mei 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/28/10340031/usai-diduga-dibuntuti-densus-88-jampidsus-kini-dilaporkan-ke-kpk>.

"*Faisal Basri Sebut Bobby dan Airlangga Terlibat Penyelundupan Nikel.*" In Harmonia, 2023, <https://inharmonia.co/index.php/berita/berita/faisal-basri-sebut-bobby-dan-airlangga-terlibat-penyelundupan-nikel>.

VeChain. "*Web3 for Better: Sustainable Blockchain Solutions.*" VeChain, 2024, <https://www.vechain.org>.